

PEMIKIRAN KONSEPSIONAL STRATEGIS PERAN BAHASA INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN ILMU (HUKUM) DEMI MENGHADAPI TANTANGAN TAHUN 2000

Oleh:

Nindyo Pramono, SH, MS.

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Jangka Panjang, yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, menuntut pengembangan ilmu (pengetahuan) yang ditujukan pada peningkatan kemampuan nasional yang diperlukan dalam pembangunan, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Demikian ditegaskan dalam GBHN dalam Pelita IV ini.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kegiatan pembangunan akan terjadi proses perubahan yang terus menerus, berkesinambungan, terencana menuju kepada suatu modernisasi demi pembinaan bangsa. Sebagai salah satu sarana menuju kepada proses perubahan tersebut, hemat penulis mutlak diperlukan pengembangan ilmu (hukum). Pengembangan ilmu (hukum) di Indonesia sebagai sarana menuju kepada proses perubahan tersebut, tidak akan lepas dari sistem nilai, tata hidup dan sarana bagi manusia Indonesia dalam kehidupannya. Hal ini berarti bahwa pengembangan ilmu (hukum) di Indonesia nampaknya

harus sejalan dengan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Satu di antara khasanah kebudayaan nasional adalah Bahasa Indonesia.

Sebagaimana kita sadari pula bahwa dalam berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak akan lepas dari bahasa sebagai sarana komunikasinya. Bahasa sebagai alat komunikasi tidak terbatas pada bahasa ucapan, tapi dapat saja merupakan bahasa isyarat atau tanda.

Sekiranya dapat diterima pendapat yang menyatakan bahwa ilmu (hukum) bersifat mendukung pengembangan kebudayaan nasional, dan di dalam mengembangkan ilmu (hukum) kita tidak akan lepas dari bahasa sebagai alat komunikasinya, maka masalahnya adalah bagaimana caranya meningkatkan peranan Bahasa (c.q. Bahasa Indonesia) dalam pengembangan ilmu (hukum) demi menghadapi tantangan tahun 2000 dan seterusnya. Sebab di masa mendatang, yakni di abad ke XXI, tantangan nasional akan semakin kompleks. Sehubungan dengan hal itu diperlukan pembinaan bahasa untuk: memperkaya khasanah ke-

budayaan nasional, untuk sarana pengembangan ilmu (hukum), sebagai salah satu sarana identitas nasional.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah meningkatkan peranan (fungsi) bahasa (Indonesia) dalam pengembangan ilmu (hukum) di Indonesia demi menghadapi tantangan tahun 2000 dan seterusnya.
2. Estimasi apa yang dapat digambarkan dalam proyeksi tahun 2000 mendatang untuk Indonesia.

Untuk tidak menimbulkan kerancuan dalam memahami paper ini, penulis mencoba memberikan batasan pengertian yang terkandung dalam judul paper ini. Di dalam judul paper ini terkandung empat pengertian pokok, dan untuk kejelasan pengertiannya diberikan pembatasan tertentu, sebagai berikut:

1. Pemikiran Konsepsional Strategis, yang dimaksud adalah suatu konsepsi rasional berjangka panjang, yang mengandung perkiraan-perkiraan tertentu serta antisipasi yang diperlukan.
2. Peran (Fungsi) Bahasa (Indonesia), yang dimaksud adalah peran (fungsi) Bahasa (Indonesia) sebagai alat komunikasi verbal dalam bidang ilmu (hukum), yang konotasinya sering disebut sebagai bahasa ilmiah.
3. Pengembangan Ilmu (Hukum),

yang dimaksud adalah proses yang aktif dan dinamis sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat.

4. Tantangan, yang dimaksud adalah sesuatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan.

BAB II BAHASA DAN ILMU (HUKUM)

A. Bahasa

Bahasa adalah alat yang sangat khusus untuk menyatakan serta menyampaikan pikiran. Bahasa merupakan alat yang luwesnya menakutkan dan bersama-sama dengan isyarat-isyarat serta pernyataan raut muka dapat mengandung beraneka warna arti yang paling mushil.¹

Memang benar bahwa di dunia ini semua manusia mempunyai Bahasa. Pemilikan bahasa inilah yang membedakan manusia dan lain-lain isi alam semesta ini. Dalam kehidupan manusia, maka fungsi bahasa yang paling dasar adalah menjelmaan pemikiran konsepsual ke dalam dunia kehidupan. Kemudian penjelmaan tersebut menjadi landasan untuk suatu perbuatan. Perbuatan ini menyebabkan terjadinya hasil, dan akhirnya hasil ini dinilai.²

¹ Herbert L. Searles. *Logika dan Metode-metode Ilmiah*. Pelajaran Pendahuluan, di alihbahasakan oleh: Soejono Soemargono, Sri Budiah Suharto, Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat, UGM, Yogyakarta, hal. 21.

² Jujun S. Suriasumantri. *Ilmu dalam Perspektif sebuah kumpulan karangan tentang hakekat ilmu*. PT. Gramedia, Jakarta, 1983, hal. 225.

Pemikiran konseptual yang dijabarkan melalui bahasa inilah yang kemudian menghasilkan ilmu (pengetahuan). Untuk mengkomunikasikan ilmu (pengetahuan) yang diperoleh dari tahu sesuatu, melihat sesuatu, heran, kagum, terpesona, kemudian mengalami sadar diri bahwa manusia mempunyai akal dan akhirnya mencoba menelaah yang mengherankan itu, semuanya tidak lepas dari peran bahasa. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ilmu (pengetahuan) yang diperoleh manusia itu dapat dikembangkan manusia oleh 2 (dua) hal utama, yakni: Pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatarbelakangi informasi tersebut. Dalam dekade terakhir abad XX ini banyak orang telah ditantang untuk memahami dengan tepat apa sebenarnya kata-kata itu, yang tidak lain adalah bahasa dan bagaimana cara penggunaannya secara lebih efektif. Salah seorang Bapak ilmu linguistik modern. F. de Saussure (seorang warga negara Swiss berbahasa Perancis) menyatakan: Tugas bahasa didasarkan atas perkaitan yang rumit antara unsur-unsur obyektif (yang bersifat fisik) dan subyektif (yang bersifat mental).³ Bunyi, yang dihasilkan sebagai kegiatan fisik, dipergunakan sebagai lambang pengertian yang akhirnya membentuk bahasa sebagai suatu gejala mental daripada se-

³ Paul Yonggi Cho, Dr., *Dimensi Keempat*. Alih bahasa oleh Wimanjaya K. Liotahe, Yayasan Immanuel, Jakarta, 1986, hal. 109.

kadar suatu gejala fisik.

Selanjutnya Saussure berkata: "Segala sesuatu di dalam bahasa pada dasarnya ialah bersifat psikologis".⁴

Dari pendapat di atas, dapat kita pahami betapa penting fungsi bahasa, peranan bahasa untuk membantu mengembangkan pengetahuan manusia.

Kedua, adalah kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Di sini peranan logika sangat menentukan. Pengetahuan yang dipergunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio atau fakta. Dalam hubungan inipun alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pikiran dan tanggapan yang logis adalah bahasa.⁵

Bertitik tolak dari kedua hal utama sebagaimana diuraikan di atas, berkembanglah faham, rasionalisme dan empirisme. Selanjutnya untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka di samping peranan logika, diperlukan sarana lain berupa bahasa, matematika dan statistika. Dalam paper ini, telaahan dibatasi pada peranan bahasa, meskipun tidak disangkal bahwa salah satu langkah ke arah penguasaan sarana berpikir ilmiah dengan baik adalah mengetahui dengan benar peranan masing-masing sarana berpikir tersebut dalam keseluruhan proses berpikir ilmiah.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Op. Cit.*, hal. 22.

Selanjutnya, akan penulis uraikan secara selintas apa sebenarnya bahasa itu. Di atas sudah penulis katakan bahwa pertama-tama bahasa adalah alat yang sangat penting khusus untuk menyatta menyampaikan pikiran.⁶ Kedua, bahasa dapat kita cirikan sebagai rangkaian bunyi. Dalam hal ini kita mempergunakan bunyi sebagai alat komunikasi verbal. Ketiga, bahasa merupakan lambang di mana rangkaian bunyi ini membentuk arti tertentu. Dari lambang-lambang ini kemudian dikumpulkan manusia dan disusun sebagai perbendaharaan kata-kata. Begitu produktifnya manusia untuk berinovasi dalam perbendaharaan kata, maka bahasa terus berkembang dan di sini peran para ilmuwan cukup menonjol dalam memperkaya perbendaharaan kata-kata ini.

Dengan bahasa, manusia dapat berpikir secara teratur dan akhirnya mengkomunikasikan buah pikirannya tersebut kepada orang lain. Dalam kaitan ini perlu kita sadari, khususnya para ilmuwan (hukum) bahwa penguasaan struktur bahasa yang tepat adalah sangat penting. Makna dari prinsip ini memperlihatkan bahwa kata-kata --yang tidak lain adalah bahasa-- bukan saja mengandung arti, tetapi secara filsafati juga mengandung sifat dan kepribadian dari si pembicara. Sebab apa? Oleh karena perkataan kita itu keluar dari dalam hati kita, maka kata-kata kita itu menguak isi sesungguhnya dari jalan pikiran ki-

⁶ *Ibid.*

ta. Itulah sebabnya bukan apa yang masuk ke dalam mulut seseorang yang menentukan sifat diri, melainkan apa yang keluar dari mulutnya. Hakekat ini hemat penulis sangat penting untuk dipahami, dihayati oleh para pemimpin, ilmuwan (hukum), hakim, jaksa dan lain sebagainya yang mempergunakan bahasa untuk mengembangkan ilmu (pengetahuan)nya. Harus disadari bahwa seorang ilmuwan misalnya, dalam mengucapkan kata-kata, memformulasikan kata-katanya dalam sebuah kalimat, dalam tulisan dan sebagainya, harus dapat dimengerti betapa penting peranan apa yang ia ucapkan itu. Bahasa ilmiah yang dipergunakan oleh ilmuwan itu bersifat diskriptif, obyektif, eksak dan tepat. Dan ini akan nampak jelas dalam jenjang langkah ilmiahnya.

Selanjutnya apabila dikatakan bahwa bahasa juga memegang peranan penting dalam kehidupan hukum, maka yang dimaksudkan adalah bahasa tertulis, yang tidak lain adalah bahasa perundang-undangan. Bahasa dan ragam bahasa yang dipakai dalam perundang-undangan sekarang ini adalah unik untuk zamannya. Ragam bahasa perundang-undangan sekarang mempunyai cirinya sendiri yang khas, yaitu berusaha untuk memaksa melalui penggunaan bahasa secara rasional. Oleh karena itulah kita bisa melihat perincian dari sisi utama tersebut ke dalam ciri-ciri:

1. Bebas dari emosi,
2. Tanpa perasaan, dan
3. Datar seperti rumusan matema-

tik.⁷

Dalam hubungan dengan masalah bahasa ini dalam hukum dapat kita lihat pula bahwa bahasa mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Sebagai alat komunikasi,
2. Sebagai suatu ragam teknis.⁸

Sebagai sarana komunikasi, maka bahasa perundang-undangan harus dapat mengantarkan pikiran dan kehendak dari si pembuat undang-undang kepada rakyat. Hukum perlu dirumuskan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyat banyak. Ilmuwan hukum dalam mengkomunikasikan pengetahuan hukumnya perlu merumuskan buah pikirannya itu dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.

Sebagaimana bahasa dengan ragam teknis, bahasa hukum merupakan sarana komunikasi di antara para ahli hukum, termasuk ilmuwan hukum. Di sini istilah-istilah hukum perlu diusahakan untuk dirumuskan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan dan perkembangan ilmu hukum. Sehingga apa yang dirasakan sebagai sesuatu yang memusingkan pada kebanyakan orang, dapat dihindari karena istilahnya dapat dipahami bersama.

Bagaimanapun juga keadaan yang dihadapi dan pendapat orang mengenai hukum, perundang-undangan dengan ragam bahasanya tersebut, perundang-undangan me-

rupakan sarana yang diunggulkan dan sekaligus puncak dari perkembangan hukum.

B. Ilmu (Hukum)

Ilmu (science = bahasa Inggris, Wetenschap = bahasa Belanda) adalah pengetahuan yang bersifat logis, sistematis, memakai metode ilmiah dan hasilnya bersifat pasti.

Ilmu sering dibedakan dengan pengetahuan. Pengetahuan ini hanya sekedar tahu, tetapi pengetahuan yang diperoleh melalui metode tertentu tadilah yang menghasilkan atau melahirkan ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa pengetahuan ini adalah genusnya dan ilmu adalah speciesnya.

Ilmu (pengetahuan) mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu:

1. Sebagai aktifitas yang bersifat intelektual, kognitif dan mengarah kepada tujuan tertentu.
2. Sebagai metode, yaitu metode ilmiah (scientific = method), pola kerja, cara teknis dan tata langkah untuk memperoleh pendapat baru atau memperkembangkan pengetahuan yang ada.
3. Sebagai pengetahuan, ilmu adalah pengetahuan yang paling utama, paling tepat, dapat diperoleh manusia, dan paling terbuktikan secara cermat.

Sebagaimana ilmu pada umumnya, dipandang sebagai proses ilmu hukum adalah suatu kegiatan sosial. Prosedur yang mencakup berbagai tindakan, pola kerja, cara teknis dan tata langkah untuk memper-

kembangkan pengetahuan yang ada, obyeknya adalah hukum sebagai gejala masyarakat. Seperti halnya dengan ilmu pengetahuan yang lain, ia tidak pernah puas dengan hanya mencatat gejala-gejala yang dilihatnya, akan tetapi sebanyak mungkin juga mencoba menerangkannya tentang hubungan sebab-akibat dengan gejala-gejala lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, di samping landasan entologis, epistemologis dan aksiologis - ilmu hukum juga memakai tiga cara, yaitu:

1. Cara sosiologis, yang menyelidiki sangkut paut hukum dengan gejala-gejala masyarakat lainnya.
2. Cara sejarah, yang menyelidiki sangkut paut hukum dari sudut perjalanan sejarahnya atau dengan perkataan lain yang menyelidiki pertumbuhan hukum secara historis.
3. Cara perbandingan hukum, yang membandingkan satu sama lain tatanan-tatanan hukum dari pelbagai masyarakat hukum.⁹

Atas dasar kriterium di atas menurut Van Apeldorn, Ilmu Hukum itu terletak dalam bidang Sein dan terbagi dalam lingkup:

1. Sosiologi hukum
2. Sejarah hukum
3. Perbandingan hukum.¹⁰

⁹ Periksa, Van Apeldorn, L.J., Mr., Dr., Prof., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 424.

¹⁰ Periksa, *Ibid.*,

Oleh karena berdasarkan kenyataan bahwa hukum senantiasa bergerak dalam bidang Sollen-Sein, maka Notohamidjojo membagi bidang ilmu hukum ke dalam lingkup:

1. Sosiologi hukum
2. Sejarah hukum
3. Perbandingan hukum
4. Ajaran hukum atau rechtsdogmatiek.¹¹

Di samping itu ilmu hukum juga mempunyai dasar pemikiran filosofis. Pemahaman aspek filosofis hukum berada dalam Filsafat Hukum yang mempunyai lima persoalan pokok, yakni:

1. Apakah asal dari hukum itu?
2. Apakah hakekat dari hukum itu?
3. Apakah tujuan hukum itu?
4. Apakah kedudukan manusia dalam hukum?
5. Apakah norma-norma bagi pengembala hukum?

Namun kelima persoalan pokok ini tidak akan diuraikan dalam paper ini.

Seperti halnya ilmu (pengetahuan) pada umumnya, ilmu hukum juga tidak terlepas dari sifatnya yang otonom dan relasional. Ilmu hukum juga tidak ingin berkembang menjadi vak idiet. Oleh karena itu sifat relasional ilmu hukum menghendaki ilmu hukum berkembang dan berhubungan dengan ilmu-ilmu lain. Seperti misalnya: ilmu hukum perlu berhubungan dengan ilmu ke-

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 119.

⁸ *Ibid.*, hal. 120

¹¹ Notohamidjojo, O., SH., Dr., *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hal. 9.

dokteran, ilmu ekonomi, psychology dan lain sebagainya. Untuk berkembang dan berhubungan dengan ilmu lain diperlukan sarana, salah satu sarana yang mutlak penting adalah bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah bercirikan tidak emosional, eksak, pasti, obyektif, tidak banyak nuansa, hipotetis dan terbuka terhadap kritik. Bahasa ilmiah harus bisa memberi jawab yang jelas terhadap sesuatu masalah. Di sinilah letak keterkaitan bahasa dengan ilmu.

Konsepsi-konsepsi yang lahir dan berkembang dalam perkembangan ilmu --termasuk ilmu hukum-- agak bermanfaat bagi kehidupan manusia (aksiologis) sangat dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan dalam konsepsi itu. Sebab suatu konsep pada seketika itu membentuk suatu pengertian tertentu di benak orang yang menangkapnya, oleh karena itulah disebut sebagai "mengandung arti".¹²

Salah satu contoh aliran dalam ilmu hukum yang memusatkan perhatiannya kepada konsep adalah "Be-griffs jurisprudenzt" atau "Ilmu Hukum Tentang Konsep".

Sebenarnya jika kita amati secara mendalam, pada hakekatnya pekerjaan-pekerjaan hukum adalah berkisar pada penyelesaian problem dan pengambilan keputusan. Dalam prosedur yang harus dilalui, ia tidak dapat lepas dari heuristik dan metodologi ilmu; yang antara lain adalah deduksi, induksi dan bahasa ilmiah (bahasa Hukum).

¹² Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 274.

Kenyataan di dalam ilmu hukum pun sering kita jumpai bahwa informasi data yang ada hanya sepotong-potong dan itupun tidak mudah untuk dikumpulkan. Dalam hubungan inilah kegunaan praktis dari metodologi ilmu. Metodologi ilmu akan menguji kesahihan dari langkah-langkah dan cara-cara yang dipakai oleh pengambil keputusan, penyelesai problem, pembuat undang-undang, ilmuwan hukum, praktisi hukum, dan sebagainya. Dengan demikian ilmu hukum akan berkembang sesuai dengan yang dicita-citakan.

BAB III PERANAN BAHASA (INDONESIA) DALAM PENGEMBANGAN ILMU (HUKUM) DEMI MENGHADAPI TANTANGAN TAHUN 2000

A. Perkiraan Tantangan Tahun 2000

M. Bow, Direktur Jenderal Unesco, di depan tokoh-tokoh ilmuwan dan kebudayaan berbagai bangsa di dunia, memimpin suatu pertemuan dengan tema "Tantangan Tahun 2000". Jika sejumlah tokoh ilmuwan dan kebudayaan demikian tergerak untuk membicarakan keadaan masa depan khususnya tahun 2000, tentulah terdapat hal-hal yang menarik perhatian dan sekaligus merupakan tantangan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Ada beberapa hal yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut, yakni:

1. Ide pembangunan, khususnya mengenai disparitas yang terdapat di antara negara-negara Utara - Selatan.
2. Hubungan kerakyatan, baik secara pribadi maupun kelompok.
3. Faktor pertumbuhan penduduk yang makin meningkat di negara-negara berkembang.¹³

Pendek kata, pertemuan tersebut membahas situasi dan kondisi dunia, baik masa kini maupun masa depan. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari kecenderungan-kecenderungan internasional yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Dari salah satu sorotan saja, misalnya tentang ide pembangunan, pastilah di abad ke XXI nanti situasi dan kondisi Indonesia dapat diestimasi sejak sekarang.

Dapat diestimasi bahwa pada abad ke XXI nanti, Indonesia akan berada dalam tatanan kemasyarakatan yang lebih modern, yakni akan memasuki kepada kehidupan masyarakat industrial yang semakin tinggi dan kompleks. Ilmu (hukum) pun akan berkembang. Keadaan itu tentu akan membawa konsekuensi sosial budaya tertentu. Teknologi canggih sebagai hasil perkembangan ilmu akan berperan. Kiranya dapat pula diestimasi bahwa masyarakat nantinya, di antaranya akan:

1. lebih kritis,
2. lebih terlibat dalam perkembangan ilmu,
3. lebih terlibat dalam penggunaan teknologi maju.

Beberapa hal yang menurut hemat penulis pantas untuk diperhatikan dalam proses modernisasi tersebut, antara lain ialah sikap hidup yang lebih rasional, lebih kompetitif dan individualistis. Kenyataan ini akan lebih didorong oleh proses pertumbuhan penduduk yang sekalipun telah ada program KB, akan tetapi diperkirakan akan tetap bertambah juga. Dengan asumsi bahwa fertilitas turun dengan 50% pada tahun 2001, penduduk Indonesia pada saat itu dapat diperkirakan sekitar 252,3 juta jiwa. Faktor jumlah penduduk ini akan lebih dominan lagi pengaruhnya terhadap perubahan sikap seperti tersebut di atas, apabila ditunjang dengan intensitas komunikasi yang cenderung akan meningkat di masa mendatang. Tantangan bagi kaum cendekiawan untuk tanggap akan estimasi keadaan ini.

Demikian pula, jika kita lihat keadaan dan letak geografis negara Indonesia yang berada pada posisi silang, yang tidak hanya berpengaruh pada segi fisik geografis saja, melainkan juga mengenai aspek kehidupan sosial budaya. Dalam waktu berabad-abad posisi silang ini telah menimbulkan akulturasi. Gelombang-gelombang bangsa-bangsa dengan berbagai budaya dan ilmunya telah masuk dan menjadikan bangsa Indonesia dalam

¹³ Periksa, UNESCO, *Bunuh Diri atau Hidup Selamat?*, Tantangan Tahun 2000, Gunung Agung, 1978, hal. 2 - 4.

wujud kbhinekaannya dewasa ini.

Bertitik-tolak dari uraian di atas, jika hal tersebut kita hadapkan dengan dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila, yang sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, maka tidak mustahil kecenderungan-kecenderungan tadi tidak sejalan dengan Pancasila yang lebih diwarnai oleh perimbangan paham rasionalisme dan empirisme. Satu estimasi fakta empiris yang akan merupakan kecenderungan yang merupakan tantangan yang cukup serius di masa mendatang adalah sikap hidup dan pola berpikir yang individualistis.

Sekarang, masalahnya bagi bangsa Indonesia, khususnya para ilmuwan, lebih khusus lagi ilmuwan hukum adalah bagaimana kita pikirkan agar pembangunan, pengembangan ilmu menuju kepada modernisasi itu tetap berjalan, akan tetapi tidak mengubah nilai-nilai yang mendasar --dalam hal ini nilai yang terkandung dalam Pancasila--, terutama apabila dikehendaki bahwa masyarakat yang akan terwujud di tahun 2000 dan seterusnya merupakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Satu faktor yang menurut hemat penulis penting adalah peranan Bahasa Indonesia sebagai alat pemerhati dan sekaligus sebagai bahasa ilmiah bagi para ilmuwan (hukum) untuk mengembangkan ilmunya, serta sebagai ciri identitas nasional

bangsa.

B. Peranan Bahasa Indonesia

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia yang diwakili oleh kelompok pemuda dengan Sumpah Pemuda, memilih Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tentunya didasarkan atas alasan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Alasan yang utama pada waktu itu lebih ditekankan pada fungsi Kohesif Bahasa Indonesia sebagai sarana untuk mengintegrasikan berbagai suku ke dalam suatu bangsa yakni Indonesia, di samping fungsi komunikatif.¹⁴

Sebagai alat komunikasi, pada pokoknya bahasa mencakup tiga unsur yakni perasaan (emotif), sikap (afektif) dan pikiran (penalaran).

Perkembangan bahasa pada dasarnya adalah pertumbuhan dari ketiga unsur dari fungsi komunikatif tersebut di atas. Tetapi dalam bidang ilmu, hanya unsur penalaran saja yang menonjol atau dominan.

Perkembangan Bahasa Indonesia untuk mampu berperan sebagai bahasa modern, bahasa ilmiah bagi perkembangan ilmu, dituntut untuk memperhatikan ketiga unsur di atas secara seimbang. Menggarisbawahi pendapat Jujun S. Suriasumantri bahwa agar dapat mencerminkan kemajuan zaman, maka fungsi komunikasi bahasa harus secara terus

¹⁴ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 1977, hal. 302.

menerus dikembangkan, namun demikian harus secara sadar dan waspada kita jaga, agar fungsi kohesif dari bahasa Indonesia --yang merupakan milik yang sangat berharga dalam berbangsa dan bernegara-- tetap terpelihara kalau mungkin bahkan ditingkatkan lagi. Untuk itu perlu dikembangkan penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sedikit demi sedikit dikurangi penggunaan Bahasa Daerah yang kita --bangsa Indonesia-- cukup banyak memilikinya, dalam artian perlu lebih ditonjolkan peranan dan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada gilirannya diharapkan masyarakat bangsa Indonesia akan lebih mahir, lebih pandai berbahasa Indonesia dibanding dengan berbahasa daerah.

Langkah-langkah lain yang perlu diambil adalah lebih menggalakkan atau meningkatkan pembekalan buta aksara. Ide yang menurut hemat penulis perlu didukung adalah untuk pembentukan kata-kata baru yang berasal dari bahasa daerah harus diarahkan kepada pengembangan Bahasa Indonesia sebagai milik nasional dalam artian yang sedalam-dalamnya. Untuk itu harus dicegah dominasi bahasa Indonesia oleh salah satu bahasa daerah dan malah harus diarahkan agar Bahasa Indonesia menghimpun khasanah kata-kata yang terbaik dari seluruh bahasa daerah kita. Apabila hal seperti ini terealisasi, penulis yakin bahwa Bahasa Indonesia akan menjadi salah satu ciri

identitas nasional bangsa Indonesia.

Demikian pula Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah yang dipakai oleh para ilmuwan (hukum) dalam mengembangkan ilmunya, harus dapat memberi jawaban yang jelas terhadap suatu masalah. Di sini dituntut peran ilmuwan (hukum) untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah yang tidak emosional, eksak, pasti, obyektif, tidak banyak nuansa, hipotetis dan terbuka terhadap kritik. Sebab di kalangan teoritis hukum pun masih terdapat aneka macam kesulitan untuk memahami bahasa hukum yang tertulis dalam perundang-undangan.¹⁵ Dapat dibayangkan kalau teoritis hukum saja masih sulit untuk memahami bahasa hukum, istilah-istilah hukum yang merupakan terjemahan dari bahasa asing, bagaimana halnya dengan masyarakat, para pencari keadilan (justitia-belen).

Kata-kata manusia, perilaku, keuntungan, kerugian, benda, norma, sanksi dan lain-lain merupakan perkataan yang sering muncul dalam bahasa hukum, yang tidak sulit untuk dipahami, karena kata-kata itu merupakan bagian dari bahasa sehari-hari. Tapi segera kata-kata itu dikaitkan dengan kepentingan sistem hukum dan penegakannya, timbul pengartian-pengartian khusus pada kata-kata yang dipergunakan sehari-hari itu. Seperti misal-

¹⁵ Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 55.

nya, kata manusia yang dalam bahasa sehari-hari tidak dibedakan dengan "orang". Dalam bahasa hukum "manusia" atau "orang" dinyatakan dengan kata "pribadi" (dalam bahasa Belanda: "persoon"). Kata pribadi dapat berkonotasi sempit atau luas artinya dari pada kata manusia atau orang; dan hal ini terungkap di dalam perundang-undangan.

Di dalam sistem hukum, kata perilaku senantiasa dikaitkan dengan akibat yang tidak dikehendaki. Perilaku (hukum) hanyalah merupakan suatu unsur dari peristiwa hukum (*Rechtfeit*), yang juga menyangkut kejadian, keadaan, tanggung jawab dan fasilitas.

Kesulitan-kesulitan rupa-rupanya tidak hanya terbatas pada pemahaman terhadap proses abstraksi oleh para ilmuwan hukum, para yuris, tetapi masyarakat pun menghadapi masalah mengenai aneka macam hasil terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, dari bahasa asli yaitu bahasa Belanda, seperti telah penulis kemukakan di atas.

Kiranya tidak kita ingkari, bahwa pergaulan hidup manusia ini memang serba kompleks. Estimasi keadaan tahun 2000 pun dapat digambarkan seperti telah diuraikan di atas. Ada perbedaan-perbedaan kepentingan, ada perbedaan kemampuan, ada kecenderungan perbedaan aspek sosial budaya, sikap hidup dan seterusnya. Kenyataan ini memang hemat penulis sulit untuk dicakup di dalam suatu peraturan

perundang-undangan yang dikehendaki untuk dapat dipahami oleh semua orang.

Oleh karena itu dapat dimaklumi kalau di dalam bahasa hukum ada bahasa yang begitu abstrak, sehingga memerlukan penafsiran. Bukan maksud penulis paper ini untuk membenarkan ketidak-jelasan yang ada. Kadang-kadang hal seperti itu tidak dapat dihindari berdasar alasan-alasan tertentu menurut alam pikiran pembuat undang-undang.

Akan tetapi meskipun demikian, menurut hemat penulis merupakan tanggung jawab ilmuwan hukum pula untuk membuat kejelasan bahasa hukum itu dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami. Sesuatu yang tidak jelas, perlu dikomunikasikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami kepada orang lain, masyarakat dan antar kalangan ilmuwan hukum sendiri. Lebih-lebih kalau kita hadap-muka kan persoalan ini dengan estimasi tantantan tahun 2000 yang demikian kompleks. Sudah sewajarnya sedini mungkin Bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum kita tingkatkan peranannya. Bahasa-bahasa hukum yang merupakan hasil terjemahan dari bahasa Belanda misalnya, diusahakan untuk diformulasikan, diartikan secara sederhana, jelas dan mudah dimengerti.

Demi perkembangan ilmu hukum memasuki era lepas landas tahun 2000, dituntut peran ilmuwan hukum untuk mengedepankan Bahasa Indonesia sebagai salah satu

kehasanah kekayaan budaya nasional. Karangan-karangan ilmiah, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya akan sangat baik kalau mampu ditulis dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Memang hal-hal di atas tidak mudah untuk dilaksanakan, akan tetapi menghadapi tantangan tahun 2000 mau tidak mau harus ditempuh. Ada beberapa cara yang barangkali dapat ditempuh, yaitu: dengan memasukkan Bahasa Indonesia ke dalam kurikulum pendidikan pada Fakultas Hukum, Penataran Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Sastra dan mengadakan program-program penerangan dan penyuluhan hukum, yang tidak terbatas pada penerangan atau penyuluhan peraturan perundang-undangan belaka. Program-program tersebut harus dilakukan secara berlanjut, berkesinambungan.

Dengan demikian Bahasa Indonesia di abad XXI bagi Indonesia harus benar-benar merupakan bahasa nasional yang mampu menjadi identitas nasional, karen di dalamnya terkandung jiwa kepribadian nasional yang akan mengimbangi kemajuan ilmu (hukum) dan teknologi yang ada.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahasa (Indonesia) yang meru-

pakan salah satu khasanah budaya bangsa merupakan 'konsepsi strategi' yang dapat diandalkan untuk mengatasi tantangan tahun 2000 dan selanjutnya.

2. Dari segi substansinya, Bahasa (Indonesia) di abad XXI dituntut mampu menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan nasional yang sejalan dengan kaidah-kaidah moral dan etika yang dijiwai oleh falsafah Pancasila.
3. Dalam pengembangan ilmu hukum, dituntut peran ilmuwan hukum untuk mampu mengkomunikasikan ilmunya dengan mengedepankan Bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum.

B. Saran-saran

1. Dari segi substansi, para ilmuwan (hukum) hendaknya lebih menghayati Bahasa Indonesia sebagai nilai budaya bangsa. Sebab bahasa sebenarnya merupakan salah satu ciri identitas nasional.
2. Perlu dipikirkan perlunya Bahasa Indonesia menjadi bagian kurikulum inti di Fakultas Hukum.
3. Perlu diadakan program penyuluhan dan penerangan hukum yang lebih berdayaguna dan berhasilguna.

DAFTAR BACAAN

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Filsafat Ilmu*, Jakarta, 1983/1984.
- Hand-out Kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan, diberikan pada mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
- Yonggi Cho, Paul, *Dimensi Keempat*, Jakarta, Yayasan Immanuel, 1986.
- Herbet L. Searles, *Logika Dan Metode-metode Ilmiah, Pelajaran Pendahuluan*. Dialihbahasakan oleh: Soemargono, Soejono, Sri Budiyah Soeharto, Yogyakarta, Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Notohamidjojo, O, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1975.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1982.
- Suriasumantri, Juju, S; *Ilmu dalam Perspektif Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu*, Jakarta, Yayasan OBOR Indonesia dan Leknas - LIPI, 1983.
- , *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Sinar Harapan, 1987.
- Soekanto, Soerjono, Abdullah, Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali, 1982.
- Unesco, Suicide of survival? *The Challenge of the Year 2000*, diterjemahkan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, *Bunuh Diri atau Hidup Selamat? Tantangan Tahun 2000*, Jakarta, Gunung Agung, 1982.
- Van Apeldoorn, L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1981.